

Bisakah Gerakan #2019GantiPresiden Dicap Makar?



Massa pendukung tanda pagar #2019GantiPresiden membentangkan spanduk raksasa saat deklarasi akbar gerakan #2019GantiPresiden di kawasan Silang Monas, Jakarta, Minggu (6/5/2018). [tirto.id/Andrey Gromico](http://tirto.id/Andrey-Gromico)

Oleh: Hendra Friana - 27 Agustus 2018

Gerakan ini tidak menggunakan kekerasan untuk menyerang pemerintahan yang sah.

tirto.id - Ahmad Aminuddin, koordinator Koalisi Elemen Bela NKRI, mengatakan gerakan #2019GantiPresiden tidak lain "upaya makar". Hal ini [diungkapkan](#) Ahmad di Surabaya, Minggu (26/8/2018) kemarin.

Bersama kelompoknya, Ahmad mendemo Ahmad Dhani di luar Hotel Majapahit, Surabaya, sedari pagi. Dhani rencananya mendeklarasikan gerakan #2019GantiPresiden, seperti yang pernah dia lakukan beberapa kali di berbagai kota.

Acara deklarasi itu akhirnya batal selain karena Dhani tak bisa keluar hotel, juga disebabkan massa yang hendak berdeklarasi dan berkumpul di sekitar Tugu Pahlawan, Surabaya, dibubarkan polisi dengan alasan tak mengantongi izin.

Tudingan yang sama diutarakan Mochtar Pabottingi, bekas peneliti utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bidang perkembangan politik nasional. Lewat [Twitter](#) ia mengatakan #2019GantiPresiden termasuk makar karena "memaksakan digantikannya seorang presiden di luar proses demokrasi sebagaimana mestinya".

Ia juga menyebut gerakan ini "konyol dan pandir sekaligus" serta merupakan "wacana politik terburuk sepanjang kemerdekaan."

Kata "makar" sebetulnya bukan istilah baru dalam politik Indonesia terkini. Dua tahun lalu, beberapa tokoh di balik gerakan #2019GantiPresiden juga dituduh makar menjelang aksi bela Islam III, salah satunya Ahmad Dhani.

Akan tetapi, apakah memang istilah makar ini tepat dilekatkan kepada gerakan #2019GantiPresiden?

Baca juga: [Sejarah Panjang Usaha Makar di Indonesia](#)

Kepala Divisi Kajian Hukum dan Kebijakan Peradilan dari Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Arsil, menyebut stempel makar tidak tepat sama sekali dilekatkan pada kelompok #2019GantiPresiden.

Menurut Arsil, pelabelan ini merupakan bentuk salah kaprah yang kerap muncul karena ketidakhahaman seseorang terhadap etimologi atau asal-usul kata makar.

Makar, dalam KUHP Indonesia yang cikal-bakalnya berbahasa Belanda, sebenarnya disebut dengan istilah "*anslaag*" yang berarti serangan atau *violence attack*. Arsil mengaku tak tahu persis sejak kapan kata "makar"—yang diserap dari bahasa Arab itu—menggantikan "*anslaag*" dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), makar memiliki tiga pengertian: (1) tipu muslihat; (2) dengan maksud membunuh atau menyerang; (3) menggulingkan pemerintah.

"Yang kedua dan ketiga itu praktik dari penerapan pasal-pasal di KUHP," kata Arsil kepada *Tirto*.

Dalam KUHP, terdapat banyak jenis makar dan tersebar di beberapa pasal yang semuanya sangat lentur alias multitafsir.

Pasal-pasal yang menyebut pidana makar antara lain, "Pasal 104 KUHP tentang makar keselamatan presiden dan wakil presiden, Pasal 106 KUHP makar wilayah negara, Pasal 107 KUHP makar terhadap pemerintahan, Pasal 139a KUHP makar terhadap wilayah negara sahabat, dan Pasal 139b KUHP makar pemerintahan sahabat."

Baca juga: [Asal Usul Pasal Penghinaan Presiden: Warisan Kolonial Belanda](#)

Benang merah dari beberapa pengertian di pasal-pasal itu adalah: penggunaan kekerasan.

Tak bisa suatu gerakan, sekeras apa pun kritiknya kepada pemerintahan yang sah, disebut makar selama mereka tidak menggunakan kekerasan.

"Gerakan #2019GantiPresiden tidak bisa dikategorikan sebagai makar," kata Arsil.

Makar beda dengan kudeta (dari bahasa Perancis, *coup d'État*), meski mengandung beberapa pengertian yang sama. Kudeta, menurutnya, merupakan istilah politik yang tidak dipakai dalam hukum dan tidak mesti menggunakan kekerasan fisik.

"Bahasa hukum ini kaku, *enggak* boleh karet. Jadi yang dimaksud dengan kudeta apa? Yang jelas praktik konkretnya itu kalau makar harus dalam bentuk serangan," jelasnya.

Dalam wawancara dengan *Tirto* pada kesempatan lain, Arsil memberikan [ilustrasi](#) begini: disebut makar jika ada ribuan orang digerakkan untuk menyerbu Istana, bisa menggunakan senjata, bisa juga tidak. Namun tak bisa disebut makar kelompok orang yang ingin pemerintahan diganti—meski tidak lewat pemilu—dengan cara, misalnya, mendemo Istana setiap hari.

Pun tak bisa disebut makar kelompok demonstran yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia, misalnya orang-orang Papua, meski mereka membawa bendera Bintang Kejora sekali pun.

"Makar itu serangan. Demonstrasi bukan [makar]," tegasnya.

GEROMBOLAN #2019GANTIPRESIDEN

Penggagas

- Mardani Ali Sera (PKS)
- Neno Warisman (Penyanyi)
- Eggi Sudjana (Politikus)

Isu

- Ketidakpercayaan terhadap Jokowi & menganggap kinerjanya buruk
- Kriminalisasi ulama

Gerakan

- Kampanye di Car Free Day di beberapa daerah
- Membuat kaos, topi, stiker & aneka aksesoris
- Memobilisasi warga ikut kampanye

Sumber: Reportase tirto.id

RGA

Pendapat serupa juga disampaikan pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada, Zainul Arifin Mochtar. Ia mengatakan, gerakan #2019GantiPresiden tak memenuhi kualifikasi jika hendak digolongkan ke dalam gerakan makar.

Selain tidak adanya tindak kekerasan, kelompok ini juga tidak membahayakan stabilitas nasional.

Lantaran pidana makar dikategorikan ke dalam kejahatan terhadap keamanan negara, tutur Zainul, rumusan delik ini adalah "penggantian pemerintahan dengan cara yang tidak sah, yang tidak berdasarkan saluran yang ditetapkan dalam Undang-undang." Sementara yang terlihat sejauh ini, gerakan #2019GantiPresiden tak lebih sebagai kampanye agar masyarakat memilih presiden yang berbeda dari yang sekarang—meski mereka tidak eksplisit menyebut Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, lawan Jokowi yang petahana—dalam pemilu mendatang.

"Karena dalam makar itu ada penggunaan *excessive power*, kekuatan yang dipaksakan. Kalau #2019GantiPresiden ini menurut saya tidak sampai sana," tuturnya.

Baca juga artikel terkait [PILPRES 2019](#) atau tulisan menarik lainnya [Hendra Friana](#) (tirto.id - Politik)

Reporter: Hendra Friana

Penulis: Hendra Friana

Editor: Rio Apinino

Siapakah yang Menolak

Deklarasi #2019GantiPresiden di Surabaya?

<https://tirto.id/siapakah-yang-menolak-deklarasi-2019gantipresiden-di-surabaya-cVeh>



Anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Nahdlatul Ulama mengikuti Apel Kebangsaan dan Kemah

Oleh: Adi Briantika - 27 Agustus 2018

Pengurus Banser dan GP Ansor mengklaim tak terlibat dalam aksi menolak deklarasi #2019GantiPresiden yang digelar di Surabaya, Minggu (27/8/2018) kemarin.

tirto.id - Ahmad Dhani cs dikepung massa ketika hendak menghadiri deklarasi #2019GantiPresiden di Tugu Pahlawan, Surabaya, Minggu (26/8/2018) kemarin. Dia sempat merekam [video](#) situasi di dalam hotel dan mengunggahnya ke media sosial. Dalam video itu, salah seorang rekan yang duduk di depan Dhani, menyebut yang mendemo mereka adalah Banser.

Banser atau Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama, merupakan badan semi otonom Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama. Banser didirikan di Malang pada 1937.

Organisasi ini disebut situs beritajatim.com yang berpusat di Surabaya, terlibat dalam aksi itu dan bahkan mengkoordinir aksi—yang menurut Dhani—dihadiri 100 orang itu. Media itu juga menyebut Ahmad Aminuddin, yang diberi atribusi "[tokoh Banser](#)", sebagai koordinator lapangan.

Menanggapi pemberitaan ini, Komandan Densus Asmaul Husna Banser Nuruzzaman mengatakan pada dasarnya tidak ada instruksi dari Pimpinan Pusat GP Ansor dan Komandan Banser Nasional untuk menggelar aksi itu. Meski demikian, ia mengakui ada kader yang turut serta dalam aksi kemarin. Ia membebaskan tiap kader daerah melakukan apa saja dengan pertimbangan mereka sudah tahu mana yang baik dan mana yang tidak.

Baca juga: [Bisakah Gerakan #2019GantiPresiden Dicap Makar?](#)

Meski demikian, karena ramainya pemberitaan, ia mengaku bakal tetap mengecek siapa saja yang terlibat.

"Soal Banser yang turun (demonstrasi) kami akan cek. Mereka benar [anggota] Banser atau bukan, masih aktif atau aktif hanya saat momentum tertentu saja, atau Banser yang melakukan insubordinasi? Nanti kami akan kategorisasi untuk mengambil tindakan yang diperlukan," ujar Nuruzzaman kepada *Tirto*, Senin (27/8/2018).

Mengenai Ahmad Aminuddin yang disebut sebagai tokoh Banser, Nuruzzaman menegaskan kalau yang bersangkutan bukan lagi bagian dari organisasinya.

"Dia mantan pengurus Pimpinan Wilayah Ansor Jawa Timur. Jadi kalau dia menyatakan atas nama Ansor dan Banser ya salah. Karena Ansor dan Banser itu organisasi yang komando," jelas Nuruzzaman.

Soal dugaan keterlibatan Banser ini, polisi Surabaya juga enggan memberitahu atas nama siapa surat pemberitahuan aksi dilayangkan kepada mereka. "Ada SOP yang harus dipatuhi," ujar Paur II Subbag Humas Bagian Operasional Polrestabes Surabaya Ipda Anita Tri Kurnia Dewi. Media lokal Surabaya hanya menyebut pendemo Dhani dengan sebutan "Koalisi Elemen Bela NKRI."

Baca juga: [Tanpa Program, #2019GantiPresiden Bakal Sulit Goyang Jokowi-Ma'ruf](#)

Relasi Banser dan Jokowi pada dasarnya memang baik-baik saja, atau setidaknya tidak konfrontatif seperti kelompok lain semisal GNPf-Ulama atau Front Pembela Islam (FPI). Ini bisa dipahami juga untuk melihat konfigurasi politik terkini. Rais Aam PBNU Kiai Ma'ruf Amin dipercaya Jokowi untuk menjadi calon wakil presiden pada pemilu mendatang.

Maka tak heran jika Nuruzzaman punya pandangan sinis terhadap gerakan #2019GantiPresiden. Menurutnya gerakan yang diinisiasi politikus PKS Mardani Ali Sera ini "tidak jelas kelaminnya."

"Mau diganti dengan apa? Kalau presiden diganti presiden. Sudah jelas siapa lawan petahana sekarang. Kenapa tidak sekalian saja, #2019PresidennyaPrabowo misalnya?" celetuk Nuruzzaman.

Hal yang sama dikatakan Ketua Umum Pimpinan Pusat Yaqut Cholil Qoumas. Menurutnya mereka tak bakal ikut gerakan yang disebut "tak jelas itu".

"Kecuali sudah mulai mengancam keutuhan bangsa, melakukan hasutan yang memecah belah. Baru akan berhadapan dengan Banser," ujarnya kepada *Tirto*, Senin.

Baca juga artikel terkait [PILPRES 2019](#) atau tulisan menarik lainnya [Adi Briantika](#) (tirto.id - Politik)

Reporter: Adi Briantika

Penulis: Adi Briantika
Editor: Rio Apinino